

ANALISIS APLIKASI JUDI ONLINE DARI SEGI KEAMANAN, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA

ANALYSIS OF ONLINE GAMING APPLICATIONS FROM A SECURITY, PRIVACY AND ETHICS PERSPECTIVE IN INDONESIAN LEGAL PERSPECTIVE

Ilham Ramadhani^{1*}, Mohammad Noer¹, Muhammad Ilyasa Mahardhika¹

^{*}E-mail : ilham10ihsan@gmail.com

¹Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN “Veteran” Jawa Timur

Abstrak

Kemajuan perkembangan teknologi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak hanya positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah munculnya sistem perjudian secara online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aplikasi judi secara holistik, meliputi aspek keamanan, privasi, etika, dan legalitas yang didasarkan pada hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini akan menggunakan metode studi literatur dengan mengacu pada 15 jurnal terkait. Penelitian ini akan menggali dan mengkaji aplikasi judi dari perspektif faktor-faktor yang telah dijelaskan dengan mempertimbangkan perspektif hukum negara Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa aplikasi judi online tidak memenuhi model CIA yang akan berdampak pelanggaran etika, keamanan dan privasi seperti kebocoran data atau informasi.

Kata kunci: Keamanan, privasi, Etika, *Hukum Indonesia, aplikasi judi, Model CIA*

Abstract

Advances in technological development in Indonesia have had impacts that are not only positive, but also negative. One of the negative impacts that will be studied in this research is the emergence of an online gambling system. The purpose of this study is to analyze gambling applications holistically, including aspects of security, privacy, ethics and legality which are based on Indonesian law, specifically the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This research will use the literature study method with reference to 15 related journals. This research will explore and examine the application of gambling from the perspective of the factors that have been explained by considering the perspective of Indonesian state law. The results of the study found that online gambling applications do not meet the CIA model which will result in violations of ethics, security and privacy such as data or information.

Keywords: *Security, privacy, Ethics, Indonesian Law, CIA Model*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengalami pertumbuhan globalisasi yang cepat. Menurut kamus Bahasa Indonesia menyatakan "globalisasi" adalah proses masuknya orang ke seluruh dunia. Globalisasi memiliki banyak efek, termasuk efek positif perkembangan teknologi terhadap banyak hal. Selain dampak positif, Globalisasi juga menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan. Banyak dampak negatif dari globalisasi seperti pencurian data, penyalahgunaan informasi digital, dan perjudian secara online[1(2018)]

Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 303 BIS KUHP, yang khusus mengatur perjudian online, mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah ([2]Muh. Miqdad Al-Qifar et al., 2023). Di sisi lain, Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam mereka yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ([3] Lubis et al., 2022). Karena perjudian ini sangat merugikan banyak orang, negara, dan moral bangsa, setiap aktivitas perjudian, termasuk judi online, dilarang dan dihukum ([4] Zurohman, 2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis aplikasi judi online dalam hal keamanan data, pelanggaran etika, keamanan aplikasi judi online ilegal, dan dampaknya terhadap privasi pengguna di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini mencakup pertanyaan tentang keamanan data yang diberikan oleh aplikasi judi online, efek negatif dari pelanggaran etika yang dihasilkan, keadaan keamanan aplikasi judi online ilegal, dan potensi resikonya, serta pengaruh diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah tersebut dan membantu mengembangkan kebijakan, penegakan hukum, dan perlindungan privasi terkait dengan permainan judi online di Indonesia

2. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah metode pengumpulan informasi pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Pada riset pustaka, penelusuran pustaka tidak hanya sebagai langkah awal dalam penyusunan kerangka acuan penelitian, tetapi juga pemanfaatan sumber pustaka dalam memperoleh bahan penelitian. Dan Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan berfokus pada bahan hukum utama. Penelitian ini mempelajari teori, konsep, asas-asas, dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian ini juga digunakan([5] Sumartini Dewi, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Review Jurnal

Tabel 1. Review Jurnal

Judul	Tahun	Penulis	Kesimpulan Review
PRINSIP KEAMANAN, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	2018	Soediro	Dalam tulisan ini, dibahas tentang prinsip keamanan, privasi, dan etika dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dalam perspektif hukum Islam. Islam sebagai agama komprehensif memiliki solusi untuk masalah kontemporer, termasuk kejahatan digital. UU ITE di Indonesia

**DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

sejalan dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran dan Hadits, terutama dalam hal keamanan, privasi, dan etika. Paper ini menyarankan pemahaman yang lebih dalam terhadap Alquran dan Hadits dapat meningkatkan ketentuan-ketentuan UU ITE.

**KEPASTIAN HUKUM
PENGUNAAN
PASAL 27 AYAT (2)
UU ITE DALAM
PERJUDIAN ONLINE
(Studi Putusan Nomor :
95/Pid.P/2021/Pn.Sby)**

2023

Muh.
Miqdad Al-
Qifari,
Tanudjaja,
Bambang
Arwanto

Dalam artikel ini, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum dalam kasus perjudian online di Indonesia. Terdapat perbedaan dalam penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang seharusnya digunakan oleh hakim, namun hakim justru menggunakan hukum pidana umum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis legislasi yang relevan. Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan kepastian hukum dalam penerapan hukum dalam kasus perjudian online.

**ANALISIS PERKARA
NOMOR
278/Pid.B/2020/PN Tsm
BERDASARKAN
PASAL 45 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN
TRANSAKSI
ELEKTRONIK
DENGAN PASAL 303
bis KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM
PIDANA**

2022

Fahmi
Zulkli
Lubis, Yat
Rospia
Brata, Dewi
Mulyanti,
Rachmatin
Artita, Iwan
Setiawan

Berdasarkan analisis kasus Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm, dapat disimpulkan bahwa kasus ini melibatkan tindak pidana perjudian dalam jaringan yang melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesulitan dalam kasus ini terletak pada pemenuhan alat bukti. Pengadilan memutuskan untuk menerapkan Pasal 303 bis dengan hukuman yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Hal ini menunjukkan peran penting hukum dalam pengembangan industri nasional di era revolusi industri 4.0.

**Dampak Fenomena Judi
Online terhadap
Melemahnya Nilai-nilai
Sosial pada Remaja
(Studi di Campusnet
Data Media Cabang
Sadewa Kota Semarang)**

2016

Achmad
Zurohman ,
Tri
Marhaeni
Pudji Astuti
dan
Tjaturahon

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa judi online memiliki dampak negatif pada nilai-nilai sosial remaja. Remaja yang terlibat dalam judi online mengalami kerugian material, menggadaikan barang berharga, dan melanggar norma agama dan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya untuk mengatasi konsekuensi

			o Budi Sanjoto	negatif dari judi online pada remaja. Untuk menghindari judi online, remaja perlu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta terlibat dalam kegiatan positif. Keluarga juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai sosial pada remaja. Selain itu, kontrol sosial yang ketat dari masyarakat dan pengawasan dari manajer dan direktur PT. Campus juga diperlukan untuk mencegah akses ke situs judi online.
Urgensi Secara Online Di Indonesia	Pengaturan Khusus Judi	2023	Sri Setiawati dan Sumartini Dewi	Dapat disimpulkan bahwa jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi pengaturan judi online di Indonesia dan dampak sosial dari perjudian online di Indonesia. Penulis juga menyimpulkan bahwa pengaturan judi online di Indonesia masih belum memadai dan perlu diperkuat, serta menyarankan beberapa langkah penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi perjudian online di Indonesia.
ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		2018	Parlindungan Twenti Saragih Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi dan Edi Yunara	Bahwa pembuktian tindak pidana judi online di Indonesia merupakan suatu hal yang kompleks dan memerlukan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim. Dalam hal ini, alat bukti elektronik dan Pasal 184 KUHAP menjadi penting dalam pembuktian tindak pidana judi online. Penelitian ini bermanfaat bagi pihak akademisi sebagai bahan pengkajian penelitian lebih lanjut serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat dalam memahami pembuktian tindak pidana judi online menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat membantu dalam pembuktian tindak pidana judi online.([6] Saragih et al., 2018)
KEKUATAN PEMBUKTIAN		2015	Putri Ayu Trisnawati,	kesimpulan yang dapat diambil adalah pembuktian transaksi pembayaran elektronik

TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNTANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 140/ Pid.B/2013/PN-TB)		Abintoro Prakoso dan Sapti Prihatmini	dalam tindak pidana perjudian online dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, skripsi tersebut juga membahas tentang penggunaan sarana M-Banking dalam transaksi pembayaran elektronik dan mengapa transaksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam tindak pidana perjudian online. Skripsi tersebut juga membahas tentang peran transaksi elektronik dalam tindak pidana perjudian online dan implikasinya terhadap hukum di Indonesia.([7] Trisnawati et al., 2015)
ANALISIS HUKUM KONTEN NEGATIF DI PLATFORM YOUTUBE DI INDONESIA	2022	Laily Indrianingsi h, Budiarsih	Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi penonton terhadap konten negatif pada platform Youtube di Indonesia dan upaya pengawasan media digital pada platform tersebut. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa meskipun KPI memiliki wewenang dalam bidang penyiaran, namun KPI tidak memiliki wewenang untuk mengawasi media sosial baru di Indonesia seperti pada platform Youtube. Konten negatif pada platform Youtube dapat mempengaruhi karakter generasi muda bangsa Indonesia, sehingga diperlukan upaya pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi penonton dari konten negatif tersebut. ([8] Indrianingsih & Budiarsih, 2022)
Pertanggung Jawaban Pidana UU ITE Terhadap Pembobolan Data Pribadi di Era Serba Digital	2022	Faisal, B. I., & Indriani, D. E.	Berdasarkan kemajuan teknologi informasi di indonesia, terutama dalam bidang Hp, Komputer, dan Internet, memberikan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak kehidupan dan budaya manusia. Dalam upaya perlindungan data pribadi, terdapat UU ITE yang mengatur penggunaan tanpa izin, perlindungan penyelenggara sistem elektronik, dan upaya melindungi dari akses ilegal. sanksi pidana yang ditetapkan adalah penjara dan denda. Namun, perlu

		dipertimbangkan agar tidak ada disparitas hukum. Evaluasi dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk melindungi data pribadi dan menghormati privasi orang lain dalam penggunaan teknologi informasi. ([9] Faisal & Indriani, 2022)	
PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA	2022	EDELWEI SS PREMAUL IDIANI PUTRI, S.H	Perkembangan digital membuka peluang dan ancaman baru dalam mengelola pasar tenaga kerja, database pelanggan, dan jaringan investor. Kurangnya persetujuan pemerintah terhadap perlindungan data pribadi dalam UUD 1945 menjadi masalah. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memadai diperlukan untuk melindungi data dari kebocoran yang merugikan. Pentingnya merancang regulasi baru dan membentuk tim penegak hukum yang khusus untuk mengatasi kebocoran data di Indonesia. Perlindungan data pribadi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dalam ekonomi digital.([10] Putri, n.d.)
PERTANGGUNGJAW ABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA	2017	Stevin Hard Awaeh	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana judi online dari perspektif Hukum Pidana serta pertanggungjawaban hukumnya. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodir tindak pidana perjudian online dalam Pasal 27 Ayat (2), namun tidak mengatur sanksi bagi para pemain. Ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian online diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) yang mengacu pada Pasal 27 Ayat (2) tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat semua pelaku yang terlibat dalam perjudian online karena tindakan ini merugikan individu, generasi muda sebagai penerus bangsa, dan negara.
2. Diperlukan pembaharuan hukum yang

mengikuti perkembangan dan perubahan zaman serta dapat mengantisipasi kemunculan tindakan hukum baru terutama dalam bidang teknologi.

3. Penysadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari perjudian online serta peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap perjudian online dan mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat.(2017)¹¹

LITERASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN ETIKA BERDIGITAL BAGI PELAJAR DI KOTA PALEMBANG	2022	Terttiaavini 1* , Tedy Setiawan Saputra2	Kegiatan literasi etika digital telah berhasil meningkatkan pemahaman dan pengetahuan remaja tentang pelanggaran yang terjadi dalam dunia digital. Evaluasi menunjukkan peningkatan persentase secara keseluruhan sebesar 1.78%. Fokus kegiatan ini adalah pada variabel pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan akibatnya dengan persentase tertinggi sebesar 27.59. Meskipun demikian, variabel pemahaman tentang etika digital masih memiliki persentase terendah sebesar 13.52. Penting untuk terus melanjutkan kegiatan ini mengingat perubahan generasi remaja yang memiliki tantangan etika digital yang berbeda. Dengan terus mengangkat isu-isu kekinian, kita dapat terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang dampak dari era digital yang sedang berlangsung.([12] Terttiaavini & Saputra, 2022)
PENERAPAN PIDANA BAGI PENYEDIA SARANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MEDAN	2020	Goklas Marulita Simatupang , Shandy Setiawan Panjaitan, Ria Sintha Devi	Penelitian ini membahas pengaruh perkembangan teknologi informasi dan internet terhadap kejahatan perjudian online. Modus operandi pelaku judi online, kendala penegakan hukum oleh kepolisian, dan penerapan pidana bagi penyediaan sarana perjudian online menjadi fokus penelitian ini.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Modus operandi perjudian online

melibatkan pendaftaran sebagai member, deposit ke rekening judi online, melakukan transaksi togel dengan memilih pasaran dan nominal pemasangan, serta penentuan hasil kemenangan oleh admin. Sistem operasional judi online berjalan 24 jam dan pembagian hasil keuntungan dilakukan kepada pemegang saham.

2. Kendala bagi kepolisian dalam penegakan hukum perjudian online antara lain terbatasnya aparat, minimnya sarana dan prasarana, mobilitas bandar perjudian online, minimnya kesaksian dari masyarakat, kurangnya kesadaran melaporkan tindak pidana, dan adanya oknum kepolisian yang mendukung perjudian.

3. Keputusan hakim terkait hukuman terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn dianggap ringan. Hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000 tidak proporsional dengan omset perjudian terdakwa yang mencapai Rp. 1.500.000.000 per bulan, sehingga tidak memberikan efek jera dan pencegahan yang cukup.(Ria Sintha Devi, n.d.)¹³

Kesimpulan ini menekankan perlunya penegakan hukum yang efektif terhadap perjudian online, termasuk peningkatan peran kepolisian, kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana, dan perlunya hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan untuk mencegah perjudian online yang merusak kehidupan bermasyarakat.

PERLINDUNGAN
ASET DIGITAL PADA
ERA METAVERSE
DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

2022

Maya
Ruhtiani,
Yuris Tri
Naili, Hesti
Ayu
Wahyuni,
Purwono

Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap aset digital dalam metaverse dan mengidentifikasi tindak kejahatan yang sering terjadi, seperti pencurian data, peniruan identitas, perusakan data, dan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Untuk melindungi aset digital dalam metaverse, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan

Undang-Undang Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri, dapat diterapkan dengan memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut.([14] Purwono Purwono et al., n.d.)

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap aset digital dalam metaverse melalui implementasi aturan yang relevan. Dalam dunia nyata, sanksi pidana dapat diterapkan untuk melawan tindak kejahatan terhadap aset digital, sementara pelanggaran terhadap Non-Fungible Token (NFT) dapat diatasi dengan hukum yang mengatur hak cipta, merek dagang, dan desain industri. Hal ini menjadi upaya untuk menjaga keamanan, privasi, dan kekayaan intelektual dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

KEDUDUKAN DAN 2021 Mei
FUNGSI Susanto
PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945:
PEMBELAJARAN
DARI TREN GLOBAL

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan fungsi pembukaan konstitusi dalam konteks tren global dan khususnya Pembukaan UUD 1945. Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat tren global dalam kedudukan hukum pembukaan konstitusi yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki dimensi interpretatif dan substantif sebagai dasar pengujian dan penerapan hukum. Pembukaan konstitusi juga memiliki fungsi sosial sebagai alat pemersatu, meskipun terkadang dapat menjadi sumber perpecahan.

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang tidak hanya seremonial, tetapi juga interpretatif dan substantif dalam pengujian norma di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta dalam kebijakan yang merujuk pada Pancasila. Namun, penggunaan Pancasila secara terpisah dari Pembukaan UUD 1945 sering kali mengurangi makna Pembukaan sebagai tempat Pancasila berada. Secara sosial, Pembukaan UUD 1945 dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dengan Pancasila sebagai jiwa dan falsafahnya. Namun, penggunaan Pancasila secara berlebihan dapat mengakibatkan penindasan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Artikel ini menyarankan agar Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila dipahami sebagai satu kesatuan yang memiliki kedudukan hukum interpretatif dan substantif. Penting juga untuk menghindari interpretasi sepihak terhadap Pembukaan UUD 1945 (termasuk Pancasila) oleh kelompok tertentu yang dapat memecah belah. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan kekuasaan yang wajar guna mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan bangsa.([15] Susanto, 2021)

Kesimpulan ini menekankan pentingnya memahami peran dan fungsi pembukaan konstitusi, termasuk Pembukaan UUD 1945, dalam konteks global dan nasional. Kedudukan hukum dan fungsi pembukaan konstitusi memiliki dampak yang signifikan dalam mempersatu bangsa dan penerapan hukum secara adil.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi judi online merupakan aplikasi yang legalitasnya di Indonesia dilarang oleh hukum sesuai pasal 27 ayat 2 dan pada surat edaran menteri komunikasi dan informatika nomor 3 pada tahun 2016. Dipenelitian terdahulu menyebutkan regulasi untuk pembuatan aplikasi harus sesuai dengan model CIA (Confidentiality, Integrity dan Availability). Dikarenakan model CIA ini merupakan model yang menjadi dasar keamanan suatu aplikasi supaya pengguna nyaman dan merasa aman terkait data pada saat penggunaan aplikasi dan kebanyakan aplikasi judi tidak memenuhi standar keamanan model CIA ini. Sudah seharusnya setiap pengguna aplikasi harus bijak dalam menggunakan suatu aplikasi dan menjaga setiap data yang bersifat pribadi untuk mencegah terjadinya pengaksesan data secara ilegal atau pencurian data.

5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Soediro. (2018). [1]. PRINSIP KEAMANAN, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL KOSMIK HUKUM*, 18. <http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3439>
- [2] Muh. Miqdad Al-Qifar, Tanudjaja, & Bambang Arwanto. (2023). KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL 27 AYAT (2) UU ITE DALAM PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.P/2021/Pn.Sby). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.287>

- [3] Lubis, F. Z., Brata, Y. R., Mulyanti, D., Artita, R., & Setiawan, I. (2022). ANALISIS PERKARA NOMOR 278/Pid.B/2020/PN Tsm BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN PASAL 303 bis KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2), 231. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8603>
- [4] Zurohman, A. (2016). *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*.
- [5] Sumartini Dewi, S. S. (2023). Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum*. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2482>
- [6] Saragih, P. T., Kalo, S., Mulyadi, M., & Yunara, E. (2018). ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
- [7] Trisnawati, P. A., Prakoso, A., Prihatmini, S., & Kalimantan, J. (2015). *FORCE EVIDENCE ELECTRONIC TRANSACTION THROUGH GAMBLING ONLINE FROM PERSPECTIVE ACT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION*.
- [8] Indrianingsih, L., & Budiarsih, B. (2022). ANALISIS HUKUM KONTEN NEGATIF DI PLATFORM YOUTUBE DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 892–916. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.71>
- [9] Faisal, B. I., & Indriani, D. E. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana UU ITE Terhadap Pembobolan Data Pribadi di Era Serba Digital*. 6.
- [10] Putri, E. P. (n.d.). *PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2022*.
- [11] Stevin Hard Awaeh. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA1. *Lex et Societatis*. <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17708>
- [12] Terttiaavini, T., & Saputra, T. S. (2022). LITERASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN ETIKA BERDIGITAL BAGI PELAJAR DI KOTA PALEMBANG. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2155. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8203>
- [13] Goklas Marulita Simatupang, & Ria Sintha Devi, S. S. P. (n.d.). *PENERAPAN PIDANA BAGI PENYEDIA SARANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MEDAN*. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1975>
- [14] Purwono Purwono, M. R., Yuris Tri Naili, & Hesti Ayu Wahyuni. (n.d.). *PERLINDUNGAN ASET DIGITAL PADA ERA METAVERSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/6804>
- [15] Susanto, M. (2021). KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945: PEMBELAJARAN DARI TREN GLOBAL. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 184. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.739>